



KPU Kota Siapkan Tiga Opsi

■ Rancangan Daerah Pemilihan Pemilu 2024

YOGYA, TRIBUN - Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta menyiapkan sejumlah skema terkait pengaturan daerah pemilihan atau Dapil Pemilu 2024.

Terdapat tiga opsi yang sedang digodog, meski sebagian besar peserta Pemilu menghendaki penetapan Dapil tidak diubah dan tetap menggunakan skema kontesasi 2019 silam. Sebagai informasi, pada Pemilu 2014 dan 2019 lalu, Kota Yogyakarta terbagi ke dalam lima Dapil, dengan jatah 40 kursi DPRD Kota Yogyakarta, yang alokasinya berbeda antara satu dengan yang lain. Sesuai skema tersebut, Dapil 1 diisi Kemantren Kraton, Mantrijeron dan Mergangsan, yang mendapat alokasi 9 kursi legislatif, untuk caleg dengan suara tertinggi.

Kemudian, Dapil 2 terdiri dari Ngampilan, Pakualaman Gondomanan dan Wirobrajan (7 kursi); Dapil 3 Jetis, Gedongtengen dan Tegalarjo (8 kursi); lalu Dapil 4 Danurejan dan Gondokusuman (6 kursi); dan Dapil 5 Kotagede dan Umbulharjo (10 kursi).

Skema itu dipilih berdasarkan luas wilayah dan perhitungan jumlah penduduk pada dua gelaran Pemilu terakhir.

Ketua KPU Kota Yogyakarta, Hidayat Widodo mengatakan, dalam PKPU No 6 Tahun 2022 sebenarnya telah diatur, bahwa penataan daerah pemilihan dilakukan selaras arah jurnam jam, dimulai dari ibu kota kabupaten atau kota setempat.

Hanya saja, hingga kini Kota Yogyakarta belum mempunyai dasar hukum terkait penetapan ibu kota di kemantren tertentu secara spesifik.

"Makanya, (Pemilu) 2019 Dapil 1 dimulai dari Kraton. Tapi, bisa ibu kota mengacu pada pusat pemerintahan atau di Balu Kota Yogya, berarti dari Umbulharjo. Tapi dasar hukumnya juga tidak kuat. Makanya, kami butuh masukan itu," ungkap Hidayat Widodo, Minggu (11/12).

Alhasil, terdapat tiga opsi yang ditawarkan dalam Uji Publik Rancangan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kota Yogyakarta Pada Pemilu 2024 yang digelarannya Sabtu (10/12) kemarin.

Opsi pertama, rancangan Dapil tidak diubah atau tetap selaras dengan Pemilu 2019, kemudian opsi kedua dilakukan perubahan nomor Dapil namun wilayah cakupan tidak berubah.

"Kemudian, opsi ketiganya, Kota Yogyakarta dibagi dalam empat Dapil, tapi setiap Dapil mendapat jatah kursi rata, masing-masing 10," urai

Hidayat. Meski demikian, dalam focus group discussion (FGD) yang dilaksanakan bersama perwakilan partai politik peserta Pemilu 2024, pemerintah, tokoh masyarakat, ormas, hingga akademisi, mayoritas menolak wacana perubahan Dapil. Sebagian besar, katanya, beralasan waktu yang tersisa jelang Pemilu 2024 sudah semakin mepet, sehingga tidak memungkinkan lagi.

"Tapi, itu bisa dipahami, khususnya bagi para peserta Pemilu, ya, kalau waktunya lama, penataan Dapil bisa saja dilakukan. Hanya saja, ketika mepet, kurang dari dua tahun misal, pasti susah," ungkapnya.

"Tentu, itu pasti menimbulkan kesulitan bagi peserta Pemilu, karena sejak jauh-jauh hari mereka, kan, sudah investasi sosial maupun politik di masing-masing Dapil yang sekarang diterapkan. Makanya, 90 persen itu menghendaki Dapil tetap," lanjut Hidayat.

Toh, ia menyebut, dari segi jumlah penduduk, Kota Yogyakarta tak

OPSI DAPIL KOTA

- 1. Dapil tidak diubah atau tetap selaras dengan Pemilu 2019
- 2. Dilakukan perubahan nomor Dapil namun wilayah cakupan tidak berubah
- 3. Dibagi dalam empat Dapil dengan setiap Dapil mendapat jatah kursi masing-masing 10

mengalami perubahan yang signifikan menjelang Pemilu 2024, atau masih di kisaran 412 ribu jiwa.

Akan tetapi, meski sudah mendengar gelombang penolakan, pendapat para peserta Pemilu pun bakal dimantapkan kembali melalui uji publik, sebelum notulensi dikirimkannya menuju KPU DIY.

"Jadwal penyampaian ke KPU DIY itu 9-19 Desember, dan dikirim ke pusat 10-26 Desember. Lalu, KPU RI menetapkan awal tahun depan, antara 1 Januari, sampai 9 Februari 2023," katanya. (aka)

Parpol Keberatan

KALANGAN partai politik di Kota Yogyakarta keberatan dengan wacana perubahan daerah pemilihan (Dapil) untuk Pemilu 2024.

Bukan tanpa alasan, perubahan Dapil berdampak besar bagi strategi pemenangan yang sudah digulirkan para parpol peserta Pemilu sejak jauh-jauh hari. Adapun KPU Kota Yogyakarta telah menyiapkan tiga opsi pengaturan Dapil.

Ketua DPC PPP Kota Yogyakarta, M Hasan Widagdo mengatakan, sejatinya wacana perubahan Dapil ini sudah muncul sejak lama, terutama soal pengalihan Dapil 1 dari Kraton ke Umbulharjo.

Tetapi, ketika hal tersebut diterapkan secara mendadak, atau mepet Pemilu 2024, parpol pun dipastikan enggan.

"Kalau diubah, berarti masing-masing partai harus merombak strategi pemenangannya. Kalau kami, tentu inginnya tetap sama. Pemilu 2024 sudah semakin dekat juga ini," katanya, Minggu (11/12).

Hasan mengusulkan, daripada

adalah menjaga akurasi data, soal tambah kurangnya penduduk, perpindahan, dan lain-lain," cetus Anggota DPRD Kota Yogya itu.

Ketua DPD PAN Kota Yogyakarta, Arif Noor Hartanto mengatakan, faktor pertanggungjawaban legislator terhadap konstituen yang memilihnya berjalan lebih baik jika Dapil tidak mengalami perubahan.

Hanya saja, kalau perubahan Dapil adalah kemiskinan, maka pilaknya pun harus cepat melakukan antispasi, karena Pemilu 2024 bakal bergulir kurang dari dua tahun.

"Kalau secara kepentingan politik, tentu Dapil yang sama akan lebih menguntungkan, lantaran kekuatan pembinaan kewilayahan dan advokasi dilandasi Dapil yang lama," ungkapnya, Minggu (11/12).

Di samping itu, penataan saksi yang kini sudah terisi penuh, hingga caleg yang sudah terdaftar 40 orang, seluruhnya dilandasi oleh karakteristik masing-masing Dapil yang diterapkan dalam Pemilu 2019 lalu. Alhasil, pria yang akrab disapa Inung tersebut tak menampik, kerugian bakal dialami partainya, seandainya KPU benar-benar menetapkan perubahan Dapil.

"Kerugian tentu ada. Tapi, kita juga tidak sepenuhnya anti terhadap perubahan. Sekarang kajian-kajian di komite pemenangan masih jalan," urainya. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005